



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI (RENAKSI) TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR

Laporan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan Rencana Aksi adalah dokumen krusial yang menyajikan realisasi capaian kinerja, anggaran, kendala, serta tindak lanjut dari program/kegiatan yang berjalan dalam kurun waktu tertentu Laporan Triwulan IV (Empat) ini bertujuan memastikan kesesuaian antara target dan pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan Triwulan III oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau capaian dan merumuskan langkah perbaikan, termasuk evaluasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut.

Demikian Laporan ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ambon, 31 Desember 2025

Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan



Erawan Asikin

Pembina Utama Muda

NIP. 196905031995031003.

I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan pembangunan daerah pada umumnya. Hasil dan rencana aksi dituangkan kedalam laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi sebagai bentuk akuntabilitas perangkat daerah menjalankan rencana aksi yang telah ada.

Rencana Aksi dan Laporan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV (Empat) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi dan Laporan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunannya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi dan ditindaklanjuti dengan monitoring evaluasi di setiap triwulannya sehingga target yang direncanakan di akhir tahun telah terealisasi.

Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di tahun selanjutnya sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja, dan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD

1.2. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing instansi (mengacu pada pedoman teknis SAKIP);
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Mengukur capaian target (output/outcome) dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan dalam perencanaan pada Triwulan IV (empat).
- 2) Mendeteksi dini masalah atau hambatan di lapangan pada Triwulan IV (empat).
- 3) Memberikan masukan strategis dan rekomendasi pada Triwulan IV (empat).
 - Memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan pada Triwulan IV (empat).
 - Menyesuaikan kegiatan dengan perubahan kondisi atau kebijakan baru pada Triwulan III.

II. RENCANA AKSI

1.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus membuat dokumen Perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tatanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyusun Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada RPJMD dan memperhatikan tugas dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Sasaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan;
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan efektif

1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan untuk periode 2025-2029 sesuai Perubahan Terakhir RENSTRA (Temokratik).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku seperti berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Mewujudkan tatakelola SD Organisasi yang handal untuk mendukung Penyelenggaraan Pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
2.	Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
		Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)
			Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)
3.	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif dan Efisien	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)
			Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan

	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan Efisien	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)
			Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)

1.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan	3.000.000.000,-
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	511.435,90
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	236.000
	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,36
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101
		Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	40,4
3.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	2,053.582,18

		Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan	-
4.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	100
		Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)	90

1.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan Penjabaran lebih lanjut atas rencana Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang dituangkan secara berkala (perbulan/triwulan). Adapun Rencana Aksi Triwulan IV (empat) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.IV	REALIASASI TW.IV	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	CC	58,80

Berdasarkan hasil Reviue Inspektorat Provinsi Maluku terkait dengan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan OPD Triwulan IV (empat) mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya hal ini karena Keterlambatan dan Penyelesaian Administrasi berupa Laporan-laporan yang perlu di reviuw (RENSTRA, LAKIP dan Dokumen lainnya).

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.IV	REALIASASI TW.IV	
2.		PAD sektor Kelautan dan Perikanan	3.000.000.000	4.332.617.000	
		Jumlah Produksi	511.435,90	488.896,80*)	

	Meningkatkan Produksi Perikanan	Perikanan Tangkap			
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	236.000	204.336,91*)	

- a. Target PAD sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV (empat) dengan Target sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan Realisasi Rp.4.332.617,233,- dimana melebihi target.
- b. Target Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Triwulan IV berjumlah 511.435,90 dengan Realisasi pada Triwulan IV (empat) sebesar 488.896,60 *) ini masih angka sementara belum mencapai target, hal ini disebabkan karena :

Produksi Perikanan Tangkap menurun karena :

1. Tingginya biaya Operasional akibat Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
2. Kesulitan akses BBM bersubsidi dan ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan pada sentra-sentra perikanan tangkap;
3. Fluktuasi harga ikan yang tidak menentu;
4. Perubahan Iklim tidak menentu yang berdampak terhadap hasil penangkapan ikan.
5. Transshipment (alih muatan)

- c. Target Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada Triwulan IV (empat) berjumlah 236.000 dengan Realisasi pada Triwulan IV (empat) sebesar 204.336,91*) Ton masih angka sementara dan belum mencapai target hal ini disebabkan karena :

Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Menurun atau Tidak Mencapai Target karena :

1. Akibat pemanasan global membuat suhu permukaan laut semakin naik dan ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan rumput laut, selain itu kondisi ini juga membuat rumput laut rentan terhadap penyakit (ice-

ice dan bulu kucing) sehingga banyak usaha budidaya rumput laut yang gagal panen.

2. Ketersediaan bibit kultur jaringan yang masih terbatas serta biaya transportasi yg mahal dan waktu pengiriman dalam beberapa hari membuat ketersediaan bibit bagi pembudidaya terbatas.
3. Harga komoditas rumput laut yang relatif rendah

Produksi Budidaya Ikan menurun karena :

1. Ketersediaan bibit ikan bubar dan kerapu yg terbatas krn produksi benih dari Balai Budidaya tidak optimal
2. Ketersediaan sarana budidaya ikan (KJA) yang terbatas
3. Ketersediaan pakan ikan rucah pada musim tertentu sulit diperoleh dan harganya mahal

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.III	REALIASASI TW.III	
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,36	112,15	
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101	100,18	
		Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	40,4	41,26	

- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Triwulan IV (Empat) dengan Target 103,36 poin dengan Realisasi pada Triwulan IV (Empat) sebesar 112.15 poin melebihi target;
- b. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) pada Triwulan IV (Empat) dengan Target 101.00 poin dengan Realisasi pada Triwulan IV (Empat) sebesar 100.18 poin hampir mencapai target;

- c. Angka Konsumsi Ikan pada Triwulan IV (Empat) dengan Target 40,4 kg/kapita/tahun dengan Realisasi pada Triwulan IV (Empat) sebesar 41.26 kg/kapita/tahun melebihi target;

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.IV	REALIASASI TW.IV	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	2.053.582.18	2.677.405,61	

Ada 4 (Empat) Kawasan Konservasi Baru yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025, yakni :

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Buru Kabupaten Buru dengan Total Luasan 57.594,12 Ha dengan Zona Inti 608,91 Ha;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan Kabupaten Buru Selatan dengan Total Luasan 51.115,64 Ha dengan Zona Inti 813,48 Ha;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Total Luasan 189.875,65 Ha dengan Zona Inti 2.922,40 Ha;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Bagian Barat Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Total Luasan 325.238,02 Ha dengan Zona Inti 2.726,42 Ha;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.IV	REALIASAS I TW.IV	
5.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	100	100	
		Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)	90	81,79	

- a. Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%) dilakukan melalui survei kepuasan yang didasarkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas kepada masyarakat hasilnya Pelayanan Baik dengan Nilai 100;
- b. Target Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan pada Triwulan IV (Empat) sebesar 90% dengan Realisasinya 81,79% belum mencapai target akibat keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pengawasan..

III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI

3.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi Trwiulan IV (Empat) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, sebagai realisasi akan pelaksanaan kinerja terhadap sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan yang diampu oleh masing-masing Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, yang dapat dilihat pada Tabel :

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

Periode Pelaksanaan : 2024

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2025-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Penanggung Jawab						
			5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	Usuan Pilihan	4																			15				
	Bidang Usuan Kelautan dan Perikanan						66.551.805.158,88		5.001.131.969	69	13.490.382.305	76	12.400.542.271	350	27.581.460.112	49%	58.473.516.656,50	89,20%	537		58.407.369.003	#DIV/0!			
	Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Provinsi	PAD Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp)				44.269.241.659	44.1429		4.863.929.707	69	11.873.219.031	76	9.040.266.515	350	16.484.109.077	42,241	42.261.524.330	95%	537		42.261.524.330	#DIV/0!			
	Pencapaian / Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100%	3.702.331.169	14%	737.594.529	14%	735.327.715	7%	895.854.514	21%	1.249.674.978	100%	3.618.453.738	100%	98%	1	3.618.453.738	#DIV/0!			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	Dokumen	1.649.966.169	1	136.940.529	1	734.577.711	1	894.864.514	1	1.248.749.478	4	3.615.158.238	100%	99%	4	3.615.158.238	#DIV/0!			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	13.146.000	1	648.000						1	648.000	100%	5%			648.000	#DIV/0!			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	7.415.000								990.000	1	367.500	100%	18%		1.357.500	#DIV/0!			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	13.371.000								1	750.000	100%	6%			750.000	#DIV/0!			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	7.415.000								1	540.000	100%	7%			540.000	#DIV/0!			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	6	Laporan	11.018.000								6		100%	0%	6			#DIV/0!			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100%	24.826.089.734,88	100%	2.972.498.429	100%	8.805.976.687	100%	5.432.350.406	100%	7.290.787.833	100%	24.501.613.557	99%	1	24.501.613.557	#DIV/0!				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	249	Orang/Bulan	24.818.589.734,88	249	2.972.498.429	249	8.805.976.687	249	5.432.350.406	249	7.290.787.833	249	24.501.613.557	100%	99%	249	24.501.613.557	#DIV/0!			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	Laporan	7.500.000	0									0%	0%				#DIV/0!			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%			100%	78.568.500	0				2	41.947.879	2	36.321.100	2	78.268.979	100%	2	78.268.979	#DIV/0!				
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	1	Laporan	32.281.100	1	32.279.379						32.281.100	1	64.560.479	100%	100%	1	64.560.479	#DIV/0!			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	1	Laporan	13.708.500	0							1	9.668.500	100%	100%	1	13.708.500	#DIV/0!				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100%	226.428.000	1	57.346.422	2	34.803.820	0	40.466.898	2	66.418.402	5	199.035.542	88%	5	199.035.542	#DIV/0!				
	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Akibat Kelangkaan	Jumlah Paket Pakan Dinas Berserta Akibat Kelangkaan	Paket	Paket	4	Paket	45.200.000	0							25.196.000	4	45.196.000	100%	100%		45.196.000	#DIV/0!			
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	146.942.000	1	57.346.422						40.466.898		146.939.542	100%	100%		13.800.000	#DIV/0!			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	10	Orang	34.286.000	0							6.900.000		6.900.000	0%	20%		6.900.000	#DIV/0!			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100%	2.880.979.751	1	122.273.100	3	378.975.525	2	723.174.650	129	1.249.216.726	138	2.473.840.001	100%	92%	138	2.473.840.001	#DIV/0!			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	17	Paket	88.895.986	1	8.916.850	1	14.735.600	14	15.267.700	14	49.357.100	17	88.277.250	100%	99%		88.277.250	#DIV/0!			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	17	Paket	774.028.988	0	14.747.000						126.185.304	17	336.598.396	16	293.709.343	17	771.240.045	#DIV/0!			
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	Paket	10.999.000	0	876.400	0	1.799.900	0	6.429.700	1	1.006.400	1	10.112.400		92%		10.112.400	#DIV/0!			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	18	Paket	219.213.720	0	41.478.250						40.996.324	18	43.842.800	18	217.507.824		99%		217.507.824	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	Paket	Paket	32	Paket	137.158.063	0							28.762.509	30	68.320.900	30	116.374.900		85%		116.374.900	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	45.000.000	0							10.580.000		7.470.000		11.180.000		29.230.000	#DIV/0!			
	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	16	Laporan	99.550.000	0							23.075.089	13	47.913.970	13	47.913.970	13	86.087.694	#DIV/0!			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	36	Laporan	990.612.000	0	56.254.600						112.540.808	36	404.915.374	36	873.391.364		88%		873.391.364	#DIV/0!	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	314.622.000								1	281.618.524	1	281.618.524		90%		281.618.524	#DIV/0!		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%			100%	1.442.823.244	0		1	29.300.000	9	227.758.620	9	915.152.419	19	1.172.208.039	1900%	71%	19	1.172.208.039	#DIV/0!			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	100.617.500										0%					#DIV/0!			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	3	Paket	71.727.480	0							2	44.075.000	1	27.588.000	3	71.663.000		100%		71.663.000	#DIV/0!
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	44	Unit	1.225.380.264	0							29.300.000	7	124.692.620	8	877.484.419	16	1.031.477.039	#DIV/0!			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	195.160.000	0							10.080.000		20.160.000		10%		20.160.000	#DIV/0!			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	0	Unit	49.938.000	0							48.908.000		48.908.000		98%		48.908.000	#DIV/0!			
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%			100%	3.517.478.604	41	458.888.163	57	574.220.029	58	461.464.465	76	1.864.920.498	232	3.359.493.155	23200%	96%	232	3.359.493.155	#DIV/0!			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	7	Laporan	18.200.000	0							2.327.000	4	10.862.000		60%		10.862.000	#DIV/0!			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	216	Laporan	1.031.077.180	39	135.883.388	57	231.677.468	55	187.087.468	65	333.103.096	216	887.751.339		88%		887.751.339	#DIV/0!			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	Laporan	2.468.201.424	2	322.134.855						340.542.561	2	272.050.000	6	1.526.152.400	12	2.460.879.816	#DIV/0!			
	Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%			100%	7.935.442.450	0	515.329.004	5	1.315.015.252	4	1.216.651.883	133	3.811.615.119	142	6.858.611.318	#DIV/0!	100%	142	6.858.611.318	#DIV/0!			
	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Perbaikan, Pjakk dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pjakk dan Perawatannya	Unit	Unit	100	Unit	5.928.720.784	0	508.181.064						1.005.569.384	100	3.005.993.343	100	5.495.162.645		93%		5.495.162.645	#DIV/0!	
	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	33	Unit	192.522.576	0	5.360.000	4	20.982.000	3	32.477.500	25	85.214.843	32	144.036.343		75%		144.036.343	#DIV/0!			
	Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	1.471.799.290	0	1.788.000						370.614.603	1	178.604.795	9	1.216.412.331		83%		1.216.412.331	#DIV/0!	
	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	3.000.000	0							1	3.000.000	1	3.000.000		100%		3.000.000	#DIV/0!		
	Program Pengabdian Masyarakat, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diklasifikasi (Ha)	Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP Kecil yang diklasifikasi (Ha)	100%			100%	2.005.582.18 Ha	0	433.900.500	0	23.749.909	0	27.508.040	0	72.977.320	0	449.890.945	7.405,61	91%		507.598.560	#DIV/0!			
	Pengalangan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Miryok dan Gila Bumi	Pengalangan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semaksimal tertata dengan baik sesuai dengan peruntukannya	100%			100%	320.009.600	0	5.230.000	0	25.558.040	0	40.665.320	0	246.695.200		318.148.560	99%		318.148.560	#DIV/0!				
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terlemba	Ha	Ha		Ha	116.160.000	0	2.280.000						3.780.000		29.920.000		79,61%		96.345.000	#DIV/0!			
	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Mempromosikan Informasi Tentang Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	Orang		Orang	3.850.000	2.950.000							900.000		3.850.000	100%		3.850.000</					

Integrasi Materi Tokoh Peran Peisir/RZWP-3.k ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Tokoh Peran Peisir/RZWP-3.k yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen				1	Dokumen	199.999.600					21.778.040	10.745.320	166.180.200	-	198.703.560	99%		198.703.560	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Pembudayaan Masyarakat Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya jumlah masyarakat peisir dan pulau-pulau kecil yang dibudidayakan	00%		00%		1		313.080.900	0	18.519.909			1.950.000	31.932.000	203.195.745	-	255.597.653,50	82%		255.597.654	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Peisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memiliki Kapasitas	Orang		Orang			Orang	78.030.900	0					28.082.000	-	48.083.813	-	76.165.812,50	98%		28.082.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengutan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok		Kelompok			Kelompok	18.950.000	0					3.850.000	-	15.100.000	-	18.950.000	100%		18.950.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pelatihan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang		Orang			Orang	12.200.000	0						-	11.710.000	-	11.710.000	96%		11.710.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pembinaan dan Pengembangan Kemampuan Masyarakat Peisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pembinaan, Kemampuan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		Kelompok			Kelompok	203.900.000	0	18.519.909			1.950.000			128.301.932	-	148.771.841	73%		148.771.841	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	00%		00%		51	335,45 ton															#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Nilai Tukar Nelayan / NTN (Poin)						103,36 poin	13.987.333.000	0	22.130.000	0	1.348.488.114	0	2.853.422.825	0	7.194.483.929	1.435,31							#DIV/0!
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sempal Dengan 12 MI	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sempal Dengan 12 MI	100%		100%		100%		13.730.249.200	0	7.240.000		1.325.178.114		2.834.522.825		7.003.544.120	-	11.710.505.059	#DIV/0!	81%		11.710.505.059	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sempal dengan 12 MI	Dokumen		Dokumen			Dokumen	134.020.000	0	7.260.000				12.170.000	-	31.460.000	-	123.620.000	92%		123.620.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sempal dengan 12 MI	Unit		Unit			Unit	13.596.229.200				1.313.008.114		2.803.062.825		6.930.814.120	-	11.046.885.059	81%		11.046.885.059	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan	00%		00%		1		26.450.000	0	5.230.000				1.800.000	-	16.170.000	-	23.200.000	#DIV/0!	88%		23.200.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rekomendasi Perizin Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Tingkat Petyelesaian Rekomendasi Perizin Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Penentase		Penentase			Penentase	5.650.000	0	2.950.000					-	800.000	-	3.750.000	66%		3.750.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkutan ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi						3	Dokumen	20.800.000	0	2.280.000				1.800.000	-	15.370.000	-	19.450.000	94%		19.450.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Peningkatan Lokasi Pemukiman serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terselenggaranya pelayanan dan operasional kepelabuhanan perikanan	00%		00%		1		204.823.800	0	4.140.000				16.560.000	-	12.420.000	-	170.989.800	99%		204.109.800	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit		Unit			Unit	0	0						-		-		#DIV/0!			#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan yang Terselenggara	Layanan		Layanan		2	Layanan	206.823.800	0	4.140.000				16.560.000	-	12.420.000	-	170.989.800	99%		204.109.800	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	00%		00%		1		16.250.000	0	5.500.000				6.750.000	-	900.000	-	13.150.000	#DIV/0!	81%		13.150.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	10.750.000	0	6.750.000				900.000	-		-	7.650.000	0%		7.650.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BRP)						1	Rekomendasi	5.500.000	0	5.500.000					-		-	5.500.000	100%		5.500.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	00%		00%		1		7.560.000	0	0				3.780.000	0	3.780.000		7.560.000	#DIV/0!	100%		7.560.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	7.560.000	0					3.780.000		3.780.000		7.560.000	0%		7.560.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)							236.000 ton														#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Nilai Tukar Pembudidaya / NTPN (Poin)							103,5 Poin	2.992.672.000	0	52.029.740	0	86.168.000	0	216.316.800	0	1.703.018.831	0,723,34					#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penerbitan izin usaha Perikanan budidaya pembenihan ikan yang Ushang Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Perizin Bidang Pembudidayaan Ikan	00%		00%		1		254.900.000	0	34.219.760				6.240.000	-	18.910.000	-	173.775.890	91%		233.145.650	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi			Rekomendasi	203.650.000	28.439.160			900.000		2.950.000		149.605.890	-	182.095.650	89%		182.095.650	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut, Berairan, Stasi Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen		Dokumen		6	Dokumen	51.050.000	0	5.580.000				5.340.000	-	15.960.000	-	24.170.000	100%		51.050.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	00%		00%		1		2.737.772.000	0	17.810.000	0	79.928.000	0	197.406.800	0	1.529.239.947	-	1.824.384.747	#DIV/0!	67%		1.824.384.747	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	15.810.000	0					3.780.000	-	11.713.600	-	15.511.600	98%		8.740.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit			Unit	2.205.285.000						57.590.000	-	1.236.961.147	-	1.294.551.147	59%		1.294.551.147	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penghijauan Kotoran Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit		2	Unit	426.547.200	0	14.550.000				64.578.000	-	94.106.800	-	250.957.200	99%		424.192.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Tetap Sehat	Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	23.990.000						9.150.000	-	4.570.000	-	9.870.000	100%		23.990.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Komersial yang Dilakuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang		Orang		40	Orang	66.540.000	0	3.260.000				2.420.000	-	41.140.000	-	19.720.000	100%		66.540.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-undangan (%)					90%		839.038.000	0	24.439.393				68.209.000		99.820.710		411.932.000	81,25%		604.451.103	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MI	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Ruang Laut	00%		00%		1		780.433.000	0	24.439.393				63.699.000	-	93.500.718	-	364.387.000	70%		548.026.103	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI		Dokumen		Dokumen			Dokumen	1.800.000	0					900.000	-	900.000	-	1.800.000	100%		1.800.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi		Dokumen		Dokumen			Dokumen	142.420.000	0	4.680.000				30.860.000	-	16.380.000	-	129.979.000	91%		129.979.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		Dokumen		Dokumen			Dokumen	317.271.000	0	19.159.393				11.950.000	-	53.620.710	-	201.037.400	90%		285.167.503	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Promobuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok		Kelompok			Kelompok	318.842.000	0	600.000				20.880.000	-	22.600.000	-	86.999.600	41%		130.479.600	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	00%		00%		1		58.065.000	0	0				4.560.000	0	6.320.000	0	45.545.000	54,42%		56.425.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Usaha Pemerasan hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemerasan dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen			Dokumen	29.620.000	0					4.560.000	-	6.320.000	-	17.740.000	97%		28.820.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi								29.025.000	0	0				0	-	27.805.000	-	27.805.000	0%		27.805.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Poin)					79	Kg/Kap/Tahun	2.830.430.000	0	14.853.200				86.740.120	0	118.118.101	0	1.338.028.333	81,79		1.557.739.754	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penerbitan Izin Usaha Pemerasan dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Pemerasan dan Pengolahan Hasil Perikanan	00%		00%		1		61.010.000	0	2.190.000				4.200.000	0	15.410.000	0	39.210.000	100%		61.010.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemerasan dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemerasan dan Pemerasan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berasarkan Stasi Usaha dan Risiko	Dokumen		Dokumen			Dokumen	57.010.000	0	2.190.000				4.200.000	-	15.410.000	-	35.210.000	100%		57.010.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemerasan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Paska Panen Pengangkutan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri								4.000.000							-	4.000.000	-	4.000.000	100%		4.000.000	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemerasan	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan, produk olahan hasil perikanan dan pemerasan	00%		00%		1		690.368.000	0	12.663.200				69.720.000	-	102.708.101	-	469.347.351	95%		654.438.652	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

<p>Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing</p>	<p>Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Peningkatan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing</p>	<p>Unit Usaha</p>	<p>Unit Usaha</p>	-	<p>Unit Usaha</p>	<p>678.008.000</p>	<p>0</p>	<p>12.663.200</p>	-	<p>69.720.000</p>	-	<p>101.508.101</p>	-	<p>458.187.351</p>	-	<p>642.078.652</p>	-	<p>95%</p>	-	<p>642.078.652</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	
<p>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Peraturan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>	<p>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Peraturan Perizinan Usaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Usaha dan Risiko</p>	<p>Unit Usaha</p>	<p>Unit Usaha</p>	-	<p>Unit Usaha</p>	<p>12.360.000</p>	<p>0</p>	-	-	-	-	<p>1.200.000</p>	-	<p>11.160.000</p>	-	<p>12.360.000</p>	-	<p>100%</p>	-	<p>12.360.000</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	
<p>Penyediaan dan Penyulutan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Meningkatnya pengolahan perikanan dan pemasaran di Maluku</p>	<p>00%</p>	<p>00%</p>	-	<p>1</p>	<p>2.079.052.000</p>	<p>0</p>	-	-	<p>12.820.120</p>	-	-	-	<p>829.470.982</p>	-	<p>842.291.102</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>41%</p>	-	<p>842.291.102</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>
<p>Pemboran Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Dokumen</p>	<p>Dokumen</p>	-	<p>Dokumen</p>	<p>1.892.500.000</p>	<p>0</p>	-	-	-	-	-	-	<p>658.232.775</p>	-	<p>658.232.775</p>	-	<p>35%</p>	-	<p>658.232.775</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	
<p>Hongembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Dokumen</p>	-	<p>Dokumen</p>	<p>186.552.000</p>	<p>0</p>	-	-	<p>12.820.120</p>	-	-	-	<p>171.238.207</p>	-	<p>184.058.327</p>	-	<p>99%</p>	-	<p>184.058.327</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	

3.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

a. Permasalahan

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yakni Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan, Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dan efisien serta Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan efektif maka ada Permasalahan yang mempengaruhi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

b. Tindak Lanjut

Semua Pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah sesuai RENSTRA, Sasaran strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan

IV. PENUTUP

Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan mencakup peningkatan kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola, Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan, Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan, Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan semuanya hampir memenuhi target pada Triwulan IV (Empat) dan ada yang belum mencapai Target karena perhitungan dinilai pada masa Triwulan terakhir.